



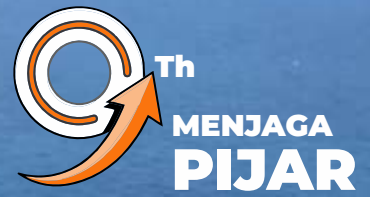
EDISI JUMAT 18 SEPTEMBER 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY



Kapal Induk Pertama RI Menuju Jakarta

Kapal induk pertama Indonesia, ITS Giuseppe Garibaldi (tengah) pada Kamis (17/9/2026) memasuki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I setelah berlayar dari Italia sejak 24 Agustus 2026. Kapal menuju Jakarta dengan dikawal KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321. dan dijadwalkan tiba di Tanjung Priok pada Jumat (18/9/2026). (dok.TNIAL)

MENCUAT JEJAK KASUS BPN DI MUKTAMAR NU

Isu keterkaitan aliran dana dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melebar. Terbaru, mencuat dugaan ada jejak aliran dana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui informasi mengenai keterkaitan tersebut sedang dialami penyidik. Namun, hingga Kamis (17/9/2026), komisi anti-rasuah belum menyimpulkan bahwa uang dalam perkara tersebut digunakan untuk membiayai Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur, yang berlangsung pada 27-31 Agustus 2026. Menanggapi kabar tersebut, internal PBNU bergerak cepat dengan menepisnya. Publik diminta tak menjadikan dugaan awal sebagai sebuah kesimpulan hukum. Ditegaskan pendanaan hajatan NU tersebut murni bersumber dari kas resmi organisasi. Terbaru, KPK menggeledah tiga ruang direktur jenderal (dirjen) Kementerian ATR/BPN. Tiga koper barang bukti dibawa dari Ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. BACA HAL 11...

Penyitaan di Rumah Tersangka Lainnya

 Rumah Simamun Niam Aulawi: **Sebesar Rp8 miliar**

 Rumah Rizal Pahlevi: **Sebesar Rp896 juta**

 Rumah Sontang Coin Manurung: **Sebesar Rp49,5 juta**

Aliran Rekening (Temuan Tambahan):
KPK juga menemukan mutasi setoran tunai sebesar Rp10 miliar dari rekening Arif Sugiyanto tertanggal 7 September 2026.

DAFTAR 8 TERSANGKA KASUS KORUPSI ATR/BPN

**Lampri (LMP)**

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

**Sontang Coin Manurung (SON)**

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I.

**Adrianto Pitojo Adhi (ADR)**

Direktur Utama / Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

**Arif Sugiyanto (ARF / Gus Arif)**

Pihak swasta, mantan Bupati Kebumen, diduga salah satu orang kepercayaan utama Menteri ATR/BPN.

**Fahd El Fouz / Fahd A. Rafiq (FEZ)**

Pihak swasta, politikus, diduga orang kepercayaan menteri.

**Erwin (ERW)**

Pihak swasta, diduga penghubung atau orang kepercayaan menteri.

**Muhammad Fakhry (MF)**

Pihak swasta, diduga orang kepercayaan menteri.

**Rizal Pahlevi (LEV):**

Pihak swasta / perantara dari pihak Summarecon.

RINCIAN UANG YANG DISITA KPK

 Uang Tunai Rupiah
Rp31,86 miliar

 Ringgit Malaysia
RM 981 [2, 7]

 Dolar Amerika Serikat
US\$ 2.611.500

 Dolar Singapura
SG\$ 1.974.500

 Riyal Arab Saudi
SAR 910

Penyitaan di Rumah Arif Sugiyanto

02

GOVERNMENTTODAY
Karhutla Meluas ke 13 Provinsi, Kemenag Buka Opsi Zakat-Infak Dana Pemadaman

05

NUSANTARA
Kala Dana MBG 2027 Direstui Rp232 T, Dugaan Keracunan Berlanjut

10

LISTSTYLE
Trik OOTD Sederhana agar Tampil Mahal Tanpa Harus Boros

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menyatakan dana infak dan sedekah yang dihimpun lembaga zakat nasional bisa dialokasikan untuk penanganan karhutla.

"Kalau infak dan sedekah sangat mungkin digunakan untuk berbagai macam kebutuhan publik ya, termasuk juga penanganan karhutla itu," ujar Rokhmad dalam Indonesia Charity Forum (ICF) Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Nasional 2026 di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Kamis (17/9/2026).

Selain jalur dana, Kemenag juga menempuh pendekatan spiritual. Rokhmad menyebut para penyuluh agama di berbagai daerah menggelar salat Istisqa sebagai ikhtiar batin memohon turunnya hujan.

"Dan kita juga selain usaha-usaha lahir juga kita juga melakukan usaha-usaha batin itu. Teman-teman penyuluh agama melakukan salat Istisqa, selawat nariyah dalam rangka untuk itu," jelasnya.

Kemenag juga tengah menggenjot program wakaf ekoteologi, di mana tanah yang diwakafkan umat akan ditanami pohon untuk penghijauan.

"Kita punya istilah juga wakaf hutan dan keanekaragaman hayati, lalu wakaf air dan ketahanan iklim untuk menjaga agar alam terus berkembang karena menjaga kelestarian bumi adalah bagian integral dari ajaran agama," tegas Rokhmad.

Potensi dana yang bisa digalang sebenarnya sangat besar. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, mengungkapkan realisasi penghimpunan zakat fitrah, zakat mal, kurban, dan wakaf sepanjang 2025 tembus Rp435 triliun.

"Untuk tahun 2025 yang terkumpul dari zakat fitrah, zakat mal, dari kurban dan juga wakaf itu kurang lebih Rp 435 triliun. Itu riil bukan potensi," imbuh Waryono. Adapun target penerimaan zakat tahun 2026 dipatok Rp327 triliun.

Masalahnya, sebagian besar dana sebesar itu justru tidak melewati lembaga zakat resmi seperti Baznas atau Lazis, melainkan disalurkan langsung oleh muzaki ke penerima.

"Dan ini perlu usaha keras gitu untuk bagaimana muzaki bayar zakatnya ke lembaga, melalui lembaga seperti baznas atau lazis gitu gitu ya," kata Waryono.

Kalimantan Barat Titik Terparah

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, memaparkan kondisi ini dalam dua kesempatan konferensi pers pada pekan ini, Selasa (15/9) dan Kamis (17/9/2026).

"Untuk penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, upaya

KARHUTLA MELUAS KE 13 PROVINSI, KEMENAG BUKA OPSI ZAKAT-INFAK DANAI PEMADAMAN

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat karhutla telah menghanguskan sedikitnya 120.377,20 hektare lahan yang tersebar di 13 provinsi, dari Sumatra, Kalimantan, hingga Jawa dan Sulawesi. Di tengah upaya penanganan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, muncul opsi pelibatan dana keagamaan.



Helikopter Chinook milik militer Jepang mulai memadamkan karhutla di Kalbar, 16 September 2026. Foto: IG/@jgsdf_gcc

pengendalian terus dilakukan melalui pemadaman darat, patroli, pemantauan titik panas, serta operasi udara," kata Berton, Kamis (17/9/2026).

Situasi paling parah terjadi di Kalimantan Barat. Luas lahan terbakar di provinsi ini sudah menembus 48.536,73 hektare, hampir separuh dari total nasional. Pada Selasa (15/9), tim di lapangan mendeteksi 19 titik api yang membakar area seluas lebih dari 261,5 hektare. Petugas berhasil memadamkan sekitar 180 hektare, namun lebih dari 80 hektare lainnya masih menyala.

Dampaknya dirasakan warga secara langsung. Menurut Berton, jarak pandang di sembilan kabupaten/kota — Mempawah, Pontianak, Melawi, Sambas, Ketapang, Kubu Raya, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kota Singkawang — anjlok hingga di bawah satu kilometer.

"Jarak pandang di bawah satu kilometer terjadi di Mempawah, Pontianak, Melawi, Sambas, Ketapang, Kubu Raya, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kota Singkawang. Sedangkan kualitas

udaranya berbahaya," ujarnya.

Kalimantan Tengah mencatat akumulasi lahan terbakar mencapai 15.976,1 hektare. Sebanyak 56 titik api terpantau membakar lebih dari 189 hektare hanya dalam sehari; 75,9 hektare berhasil dipadamkan, sisanya lebih dari 113 hektare masih membara. Kota Palangka Raya paling terdampak.

"Visibility sebesar di bawah lima kilometer terutama di Kota Palangkaraya. Sedangkan kategori udara adalah kategori sangat tidak sehat," kata Berton.

Kalimantan Selatan mencatat total 19.303,99 hektare lahan terbakar, dengan 40 titik api yang membakar lebih dari 210 hektare pada Selasa (15/9), 136 hektare lebih sudah dipadamkan, 73 hektare lebih masih ditangani. Jarak pandang di wilayah ini tercatat sembilan kilometer.

Sementara Kalimantan Timur relatif lebih terkendali dengan luas terbakar 5.761,57 hektare dari 20 titik api. "Visibility relatif normal antara delapan sampai sepuluh kilometer

dengan cuaca cukup cerah dan minim kabut asap," ucap Berton.

Di Pulau Sumatra, Riau mencatat total lahan terbakar sepanjang 1 Januari–16 September 2026 mencapai 20.015,35 hektare, bertambah sekitar 19,3 hektare hanya dalam sehari.

"Dengan tambahan sekitar 19,3 hektare pada periode pemantauan," imbuh Berton. Ia menambahkan, "Jarak pandang sebesar 3,7 sampai empat kilometer dan kualitas udara tidak sehat di Rokan Hilir, Bengkalis dan Siak."

Sumatra Selatan mencatat 6.552,31 hektare lahan terbakar dengan visibilitas menurun ke rentang empat hingga delapan kilometer. "Visibility relatif menurun tetapi ini masih jarak pandang sebesar empat sampai delapan kilometer," tutur Berton.

Adapun Jambi, meski luasannya lebih kecil (2.998,02 hektare), justru mencatat jarak pandang terburuk di antara provinsi Sumatra lain, hanya sekitar 1.100 meter dari 22 titik api yang melanda 44,5 hektare lahan.

Kabut asap dari karhutla ini turut mengganggu aktivitas penerbangan, sejumlah media melaporkan operasional Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, terganggu kabut asap karhutla pada pekan ini.

Karhutla juga merambah kawasan yang biasanya bukan langganan bencana ini. Di Jawa Timur, api masih melalap kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Gunung Butak, dengan luas kebakaran di Gunung Butak saja mencapai 478 hektare.

Jawa Tengah melaporkan titik api di TPA Putri Cempo, Surakarta (6,3 hektare, dengan 0,6 hektare belum padam total), serta dua kecamatan di Kabupaten Wonogiri seluas 16,59 hektare. "Sedangkan untuk Kabupaten Wonogiri di dua kecamatan kebakaran seluas 16,59 hektar dan tidak ada korban jiwa," kata Berton.

Kalimantan Utara mencatat lebih dari 4 hektare terbakar di Desa Gunung Seriang, Kabupaten Bulungan. "Tidak ada korban jiwa dan api masih dalam proses penanganan oleh tim gabungan," ujarnya. (tin,cnn,kum,ist/dya)

REVISI UU KEUANGAN NEGARA, DPR DORONG FLEKSIBILITAS BATAS DEFISIT APBN 3%

Komisi XI DPR RI membuka kembali perdebatan mengenai batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketentuan yang selama ini menjadi salah satu patokan utama disiplin fiskal itu dinilai perlu dievaluasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Ketua Komisi XI DPR RI
Mukhamad Misbakhun

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan angka 3 persen tidak tercantum sebagai norma yang bersifat absolut dalam batang tubuh UU Keuangan Negara. Menurut dia, angka tersebut berada dalam bagian penjelasan Pasal 12 ayat (3).

"Orang mengatakan defisit 3 persen, saya tanya di pasal berapa, enggak ada yang bisa menyebutkan. Defisit itu bukan norma. Defisit itu gak ada di norma," kata Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Keuangan Negara di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Ia juga mempertanyakan ketentuan rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB yang selama ini turut dijadikan rujukan dalam pengelolaan fiskal.

"Rasio utang 60 persen itu tidak ada di norma," ujarnya.

Menurut Misbakhun, pembatasan defisit tidak semestinya diperlakukan sebagai angka yang tidak dapat dievaluasi. Pemerintah, kata dia, membutuhkan ruang fiskal untuk melakukan intervensi ketika perekonomian membutuhkan dorongan.

"Bagaimana cara mencapai ekspansi pertumbuhan itu kalau kita nge-lock di sana? Kita itu selalu membicarakan defisit 3 persen itu," kata dia.

Misbakhun mengaitkan kebutuhan ruang fiskal tersebut dengan agenda Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Menurut dia, Indonesia juga memiliki momentum bonus

demografi yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi ekonomi.

"Kemudian Indonesia ini punya gak luxurioustime itu? Punyaluxurioustime, ketika kita mendapatkan bonus demografi untuk mengeluarkan, men-shifting negara ini keluar dari middle income trap," ujarnya.

Ia menilai pembahasan mengenai defisit tidak cukup hanya berfokus pada angka akhirnya. Kondisi penerimaan dan belanja negara yang membentuk defisit juga perlu diperhitungkan.

"Sudah terjebak dalam perangkap middle income trap, kita terjebak dalam pemikiran supaya kita tidak keluar dari itu. Keluar dari pemikiran saja, enggak mengeluarkan keadaan negara. Nah ini yang harus kita satu sisi mengenai 3 persen ini," tutur Misbakhun.

Gagasan mengenai fleksibilitas batas defisit juga disampaikan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Chaikal Nuryakin dalam forum yang sama.

Chaikal mengusulkan batas defisit 3 persen tidak harus dipenuhi secara kaku setiap tahun. Sebagai alternatif, batas tersebut dapat dihitung dalam kerangka jangka menengah sehingga pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan fiskal ketika menghadapi kondisi tertentu.

"Menurut kita, memang ada fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara mengenai defisit 3%. Untuk, misalnya, tahun-tahun tertentu," kata Chaikal.

Ia mengusulkan agar batas tersebut dapat diterapkan dalam periode tertentu, misalnya 10 tahun, dengan tetap memiliki aturan yang jelas mengenai fleksibilitas defisit pada masing-masing tahun.

"3% ini sebaiknya bukan per tahun, tapi lebih baik kepada mid term tertentu. Jadi dalam 10 tahun harus 3%. Tapi ada fleksibilitas tiap tahun yang memang harus dipenuhi. Jadi memberikan fleksibilitas kepada pengambil kebijakan juga," tuturnya.

Chaikal menekankan fleksibilitas tersebut tetap membutuhkan pengaturan yang jelas agar tidak berubah menjadi keleluasaan fiskal tanpa batas.

Perdebatan mengenai batas defisit muncul ketika pemerintah justru merancang RAPBN 2027 dengan defisit 2,40 persen terhadap PDB.

Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Pemerintah menyebut RAPBN 2027 tetap dirancang ekspansif dengan pembiayaan yang dilakukan secara hati-hati. Pembiayaan diarahkan melalui kombinasi pembiayaan utang dan nonutang dengan mempertimbangkan biaya, risiko, serta manfaat jangka panjang.

Dari sisi belanja, belanja pemerintah

TARGET EKONOMI UTAMA DALAM RAPBN 2027

Pertumbuhan Ekonomi:

Ditargetkan sebesar 6,0% (naik dari target tahun-tahun sebelumnya untuk mengejar status negara maju).

Postur Anggaran (Pemasukan & Pengeluaran)

○ Pendapatan Negara:

Rp3.426,0 triliun

(Andalan: Pajak lewat sistem Coretax).

○ Belanja Negara:

Rp4.097,2 triliun

(Gabungan Belanja Pusat & Transfer ke Daerah).

○ Defisit Anggaran

Rp671,2 triliun

(Setara 2,40% dari PDB, masih aman di bawah batas hukum 3%).

○ Bayar Bunga Utang

Rp650,31 triliun.

pusat direncanakan Rp3.362,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp735 triliun. Penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.908 triliun dan keseimbangan primer masih diproyeksikan defisit Rp20,9 triliun.

Pakai Metode Omnibus

Pembahasan revisi UU Keuangan Negara sendiri mulai dilakukan Komisi XI DPR dengan meminta pandangan para pakar ekonomi. Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengatakan revisi akan menggunakan pendekatan omnibus law.

"Kita akan menggunakan metode omnibus, sehingga ada berbagai klaster yang sudah kita identifikasi," ujar Hekal dalam RDPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Ekonom Indef Didik J. Rachbini dalam forum tersebut menyebut UU Keuangan Negara yang berlaku saat ini memiliki kekurangan pada fondasi fundamental. Ia menilai aturan tersebut lebih banyak mengatur aspek teknis dan administratif.

"Saya mencermati ada kekurangan fondasi yang fundamental dari UU Keuangan Negara ini yang merupakan warisan lama. Saya menganggap UU ini hanya mengatur teknis," kata Didik.

Ia mengusulkan penambahan bab yang mengatur integritas dan ekonomi politik keuangan negara, termasuk persoalan konflik kepentingan.

Menurut Didik, UU Keuangan Negara saat ini memiliki bobot administratif yang besar dan lebih menekankan aspek kepatuhan serta akuntansi. Karena itu, regulasi tersebut dinilai perlu mengatur perilaku dalam pengelolaan keuangan negara.

"UU harus mengatur perilaku," katanya. "Jadi, pengaturan dari UU KN paling tidak hal-hal yang penting untuk diatur adalah isu-isu conflict of interest." (gus,ist,kum/dya)

Update Dua Musibah Laut Indonesia **OPERASI SAR 5 JURNALIS DIHENTIKAN, 129 KORBAN KM VIRGO MASIH DICARI**

Perkembangan dua musibah laut di Indonesia membawa kabar berbeda. Operasi pencarian lima jurnalis dan tiga kru KM Arupadhatu I yang hilang kontak di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Di sisi lain, pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa masih dilanjutkan. Pada Kamis (17/6/2026) masih ada sekitar 126 korban yang belum ditemukan.



Operasi pencarian lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau memasuki hari kesepuluh dan resmi berakhir pada Kamis (17/9/2026) dengan hasil nihil. (ant.ist)

Penghentian operasi pencarian rombongan jurnalis diumumkan Gubernur Banten Andra Soni di Posko Utama SAR Gabungan, Dermaga Marina Carita, Pandeglang, Kamis sore.

"Sudah tidak efektif maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini dinyatakan dihentikan," kata Andra, Kamis (17/6/2026)

Sepanjang operasi, tim SAR gabungan tidak menemukan tanda keberadaan delapan orang yang berada di KM Arupadhatu I. Pencarian dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara dengan melibatkan 523 personel.

Area penyisiran pada hari terakhir mencapai 8.509 mil laut persegi. Tim juga mengerahkan 24 kapal dan membagi wilayah pencarian ke dalam 10 sektor.

Selama pencarian, tim SAR menemukan 13 objek terapung. Namun, setelah diverifikasi Ditpolairud Polda Banten, seluruh benda tersebut tidak berkaitan dengan KM Arupadhatu I maupun perlengkapannya.

Meski operasi resmi ditutup, pencarian tidak sepenuhnya berakhir. Pemerintah daerah dan Basarnas menyatakan operasi dapat kembali dibuka jika muncul petunjuk baru atau

laporan masyarakat yang terkonfirmasi.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad menegaskan penghentian tersebut bukan berarti pencarian ditutup untuk selamanya.

"Namun pencarian bukan disetop total karena apabila ada petunjuk atau tanda-tanda keberadaan mereka yang hilang, operasi akan dibuka kembali," kata Al Amrad.

Delapan orang yang hilang terdiri atas lima jurnalis dan tiga kru kapal. Lima jurnalis tersebut ialah M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto ANTARA; Arie Basuki, pewarta foto Merdeka.com; Yudistiro Pranoto, pewarta foto iNews.id; Firdaus Wajidi, jurnalis Anadolu Agency; dan Donal Husni, jurnalis lepas.

Sementara tiga kru KM Arupadhatu I terdiri atas Warta sebagai kapten kapal, Surakman sebagai anak buah kapal, dan Heriyanto sebagai pemandu.

Sebelum dihentikan, operasi pencarian telah diperpanjang tiga hari. Perpanjangan dilakukan setelah pencarian selama tujuh hari pertama belum menemukan korban dan adanya permintaan keluarga serta Pemerintah Provinsi Banten.

Gubernur Banten sebelumnya

meminta agar pencarian dimaksimalkan. Pemerintah daerah juga meminta dukungan Basarnas, Polairud Polda Banten, Lanal Banten dan unsur terkait lainnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan TNI Angkatan Laut untuk membantu pencarian. Sebanyak 11 kapal gabungan dikerahkan pada tahap awal operasi pencarian.

Operasi Udara di Laut Jawa

Berbeda dengan operasi di Selat Sunda, pencarian korban KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa masih berlangsung pada Kamis.

Kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin itu membawa 243 orang dalam perjalanan sekitar 20

jam. Kapal terbalik pada Minggu dini hari, 13 September 2026, ketika menghadapi cuaca buruk.

Data terbaru menunjukkan enam orang meninggal dunia, 108 orang berhasil selamat, sementara 129 orang masih dalam pencarian. Angka tersebut belum berubah sejak awal operasi.

Pada hari kelima pencarian, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin membagi operasi menjadi sektor udara dan laut.

"Pada hari kelima operasi, strategi pencarian dibagi menjadi dua sektor utama, yaitu pencarian udara dan laut," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin I Putu Sudayana.

Untuk sektor udara, tim menyisir area sekitar 1.489 mil laut persegi. Helikopter Basarnas, Polri, dan TNI AL dikerahkan dalam operasi tersebut.

Pencarian di sekitar badan kapal menghadapi persoalan lain. Arus laut yang kuat membuat penyelaman ke badan kapal sulit dilakukan.

Dua tim penyelam TNI AL sempat melakukan pencarian bawah air pada Rabu, tetapi harus ditarik karena kecepatan arus mendekati tujuh knot. Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan penyelaman direkomendasikan ketika arus berada di bawah 1,5 knot.

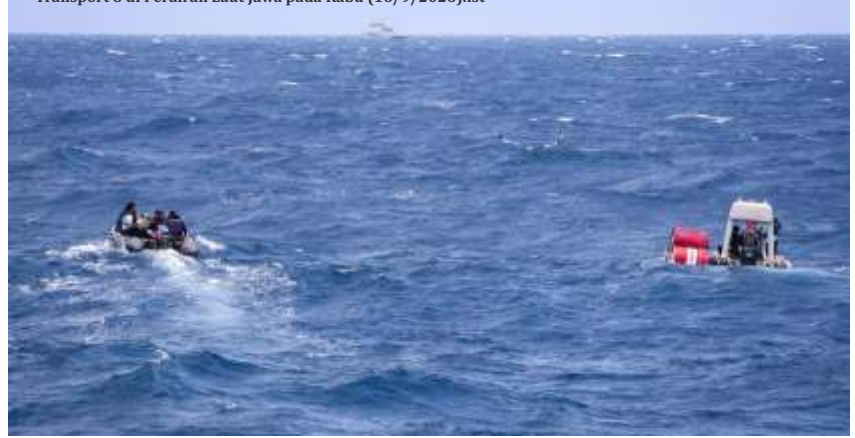
Karena kondisi tersebut, tim SAR mempertimbangkan operasi salvage untuk membalik posisi Virgo Transport 8. Setelah kapal berhasil ditegakkan, tim akan melakukan pencarian dan evakuasi di dalam kapal.

"Kami berencana melakukan salvage dengan membalik kapal ke posisi tegak dan kemudian melakukan pencarian dan evakuasi. Setelah kami memastikan operasi selesai, kapal akan ditarik untuk kepentingan penyelidikan," ujar Syafii.

Proses membalik kapal diperkirakan membutuhkan sekitar 24 jam. Namun, waktu tersebut dapat bertambah apabila muncul kendala selama operasi.

Virgo Transport 8 kini berada sekitar 80 mil laut atau 150 kilometer dari Pelabuhan Banjarmasin. Kapal berada di perairan dengan kedalaman sekitar 29 meter dan telah bergeser sekitar

Personel TNI AL dari KRI I Gusti Ngurah Rai-332 melanjutkan operasi SAR hari ketiga untuk KM Virgo Transport 8 di Perairan Laut Jawa pada Rabu (16/9/2026).ist



KALA DANA MBG 2027 DIRESTUI RP232 T, DUGAAN KERACUNAN BERLANJUT

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp232,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Pada saat yang sama, dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG kembali dilaporkan di sejumlah daerah.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR pada Kamis (17/9/2026), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan total anggaran indikatif BGN 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,5 triliun dialokasikan untuk program MBG.

Besarnya anggaran itu berjalan bersamaan dengan munculnya laporan siswa dan guru mengalami mual, muntah, diare, sakit perut hingga harus mendapat perawatan setelah menyantap makanan MBG di sejumlah wilayah.

Sudaryono mengatakan anggaran BGN 2027 telah mengalami penyesuaian dari rencana awal.

"Anggaran khusus Bantuan Pemerintah disesuaikan dari yang semula direncanakan sebesar Rp262 triliun menjadi Rp232 triliun," kata Sudaryono dalam rapat dengan Komisi IX DPR.

Dalam struktur anggaran 2027, Program Pemenuhan Gizi Nasional mendapat alokasi sekitar Rp232,876 triliun. Dari jumlah itu, anggaran untuk MBG mencapai sekitar Rp232,503 triliun atau 99,84 persen. Sementara dukungan manajemen BGN mendapat sekitar Rp7,325 triliun.

Sebagai pembanding, alokasi MBG pada 2026 setelah penajaman tercatat Rp218,77 triliun. Dengan demikian, alokasi MBG 2027 meningkat sekitar Rp13,7 triliun.

BGN menyebut penyesuaian tersebut mencakup efisiensi sekitar Rp30 triliun dari rencana awal.

Di sisi lain, program MBG masih terus diperluas. Hingga 31 Agustus 2026, BGN mencatat program tersebut telah menjangkau 56,9 juta penerima manfaat atau 76,45 persen dari target 74,5 juta penerima pada 2026.

BGN juga menyiapkan perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus melakukan penajaman sasaran dengan mengeluarkan 1.653 sekolah elite dari daftar penerima.

Di tengah perluasan cakupan, BGN menyatakan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus diperkuat, termasuk melalui penerapan standar higiene dan sanitasi.

SPPG yang belum memenuhi standar dapat dikenai sanksi suspend sampai proses perbaikan selesai.



Pelajar sedang dirawat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sele Be Solu Kota Sorong ketika dikunjungi Ketua SATGAS MBG Kota Sorong Rudy Laku.

Kebijakan tersebut kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan dilaporkan dalam waktu berdekatan.

Ratusan Siswa Mengeluh

Di SMKN 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, jumlah siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan dilaporkan terus bertambah setelah menyantap menu MBG pada Rabu (16/9).

Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 1 Boyolangu, Fajar Luthfianto, mengatakan sekolah mulai menerima laporan siswa mengalami gangguan pencernaan sejak Rabu malam.

"Jumlahnya terus bertambah, kami segera laporkan kejadian ke Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas mengirim dokter untuk melakukan pemeriksaan."

Menu yang disantap antara lain nasi daun jeruk, ayam goreng, lalapan, sambal, dan anggur. Keluhan dilaporkan berupa mual dan diare.

Pemeriksaan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan tersebut. Karena itu, kasus ini sementara lebih tepat disebut dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG, bukan keracunan yang telah dipastikan.

Di Trenggalek, 77 penerima manfaat MBG dari MA Global dan SMP Global di Kecamatan Karangan dilaporkan mengalami diare dan sakit perut setelah mengonsumsi menu MBG.

Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Sunarto, mengatakan keterkaitan gangguan kesehatan dengan makanan MBG masih ditelusuri.

"Dugaan keterkaitan gangguan

kesehatan tersebut dengan makanan MBG masih dalam proses penelusuran," kata Sunarto.

Sampel makanan diperiksa untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.

BGN kemudian menjatuhkan sanksi suspend selama 30 hari terhadap SPPG Karangan yang menyuplai makanan. Sanksi tersebut berlaku mulai 16 September 2026.

Di Kota Blitar, 20 siswa dari SLB Negeri 1 Kota Blitar dan SMP/MTs Al Muhafizhoh dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, Endang Purwono, mengatakan 20 siswa mengalami keluhan kesehatan dan sebagian mendapat penanganan di fasilitas kesehatan.

"Total ada 20 siswa yang mengalami keluhan. Sebanyak 18 siswa kami lakukan penanganan di fasilitas kesehatan, sedangkan dua lainnya kondisinya sudah membaik."

Dinkes juga menemukan indikasi arsen atau logam berat pada pemeriksaan awal salah satu sampel makanan, yakni rolade telur. Temuan tersebut masih merupakan hasil pemeriksaan awal dan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa arsen menjadi penyebab keluhan para siswa.

Karena itu, hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan diperlukan untuk memastikan kandungan, sumber, serta kaitannya dengan gangguan kesehatan yang dialami siswa.

Di Bireuen, Aceh, sebanyak 17 siswa SMAN 1 Kuala dilaporkan mendapat penanganan di IGD RSUD dr Fauziah setelah mengalami pusing dan muntah.

Sejumlah siswa juga mengaku melihat ulat dalam makanan yang mereka santap.

Namun, hingga penelusuran ini dilakukan, belum ditemukan pernyataan langsung dari pejabat kesehatan atau pihak sekolah yang cukup kuat untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Di Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebanyak 26 siswa SMP Muhammadiyah Al-Amin dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG pada Rabu (16/9).

Ketua Satgas MBG Kota Sorong, Rudy Laku, mengatakan delapan siswa mengalami gejala lebih berat sehingga harus mendapat perawatan di RS Sele Be Solu.

"Setelah dilakukan observasi lanjutan, ada delapan orang yang gejalanya agak berat sehingga dikirim ke Rumah Sakit Sele Be Solu. Sisanya ditangani di sekolah, diberikan obat, kemudian bisa pulang." Rudy juga mengatakan SPPG Malaimsimsa Klabalu ditutup sementara untuk pemeriksaan.

"Jadi ada indikasi ke situ, kita belum bisa pastikan. Kemudian langkah yang kita lakukan adalah menutup sementara SPPG Malaimsimsa Klabalu untuk dilakukan pemeriksaan."

Sampel makanan selanjutnya diperiksa untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan tersebut.

Di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dugaan gangguan kesehatan dilaporkan terjadi di dua sekolah di Kapanewon Temon.

Sebanyak 29 siswa MTs Ma'arif Jangkar dan sembilan siswa SMP Muhammadiyah 1 Temon dilaporkan mengalami gejala setelah menyantap makanan MBG. Keluhannya antara lain mual, muntah, pusing, dan sakit perut.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susilaningsih, mengatakan tujuh dari 29 siswa MTs Ma'arif Jangkar mengalami muntah.

"Dari 29 siswa yang sakit di MTs Ma'arif Jangkar, sebanyak 7 anak mengalami muntah. Dua siswa di antaranya sempat memeriksakan diri ke Puskesmas Temon II karena mengalami gejala perut melilit, mual, muntah, dan pusing." Di Lampung Selatan, 11 siswa MI Syamsul Ma'arif Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah menyantap menu MBG. (tin,ist,mol/dya)

Kebakaran di Kota Malang Agustus Tembus 28 Kasus, September Diprediksi Lebih Tinggi

Ilustrasi: Petugas Damkar Kota Malang melakukan upaya pemadaman api di TPS Jatimulyo, Lowokwaru. (foto: UPT Damkar Kota Malang)



MALANG - Musibah kebakaran di Kota Malang menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang mencatat 28 kasus sepanjang Agustus 2026. Di bulan September, angka tersebut diprediksi meningkat seiring kondisi cuaca yang panas dan kering.

Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizki Darmawan mengatakan, secara keseluruhan terdapat 85 kasus

kebakaran yang ditangani sejak Januari hingga akhir Agustus 2026.

"Peningkatan paling signifikan terjadi dalam tiga bulan terakhir. Jumlah kejadian yang semula tercatat 7 kasus pada Juni, meningkat menjadi 22 kasus pada Juli, kemudian kembali naik menjadi 28 kasus pada Agustus. Peningkatan kasus salah satunya dipengaruhi oleh faktor kemarau kering dan angin, yang semakin mempercepat proses

perambatan api," ujar Pandu, Kamis (17/9/2026).

Dari total 85 kejadian tersebut, menurutnya kebakaran lahan dan Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) sampah menjadi penyumbang terbesar. Lokasinya tersebar di sejumlah kelurahan, termasuk lahan kosong, area perengan, hingga barongan sungai yang ditumbuhi rumput dan bambu.

"Kebakaran pada rumah maupun bangunan gedung juga masih terjadi, namun jumlahnya tidak sebanyak kebakaran lahan dan TPS," katanya.

Pandu menyebut, salah satu pemicu kebakaran lahan dan TPS tersebut berasal dari aktivitas membakar sampah yang tidak diawasi. Masyarakat yang berniat membakar sampah terkadang meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam sehingga api merambat ke material lain di sekitarnya.

"Ini sangat berbahaya karena yang pertama bisa semakin meluas ke lahan, perkebunan, atau bahkan bisa sampai menjalar ke permukiman," katanya.

Kondisi tersebut bahkan sempat terjadi di wilayah Bumiayu pada September 2026. Kebakaran yang bermula dari lahan kosong merambat hingga menyambar bagian plafon rumah yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.

Pandu menegaskan, peristiwa tersebut belum masuk dalam rekapitulasi 85 kasus kebakaran Januari hingga Agustus. Namun, kejadian itu menjadi salah satu gambaran risiko kebakaran lahan di tengah kondisi cuaca yang masih panas dan kering.

Dikatakannya, melihat kondisi cuaca, jumlah kebakaran pada September berpotensi melampaui catatan Agustus yang mencapai 28 kasus. "September dimungkinkan akan melebihi," terangnya.

Indikasi peningkatan tersebut juga terlihat dari penanganan kebakaran pada Minggu (13/9/2026). Dalam sehari, petugas Damkar Kota Malang menangani 4 kejadian kebakaran yang tersebar di Jatimulyo, Purwantoro, Bumiayu, serta Bandungrejosari, tepatnya di belakang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Selain berpotensi meluas, Pandu mengatakan, kebakaran lahan dan TPS juga memiliki tingkat kesulitan pemadaman yang berbeda dibandingkan kebakaran bangunan. Petugas harus mewaspadai keberadaan api tersembunyi atau hidden fire yang dapat bertahan di bagian bawah material.

Dijelaskannya, pada kebakaran lahan maupun TPS, api dapat tersimpan hingga kedalaman sekitar satu meter di bawah permukaan. Karena itu, membasahi permukaan belum tentu membuat seluruh titik api benar-benar padam. (Santi/Dya)

Padi Sukma Diakui Kementan, Pemkab Malang Bidik Produktivitas 10 Ton/Ha

MALANG- Varietas Padi Sukma asal Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, resmi diakui Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Surat Keputusan (SK) Pelepasan Varietas yang terbit pada awal Agustus 2026.

Setelah memperoleh legalitas izin edar tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membidik Padi Sukma untuk dikembangkan sebagai varietas unggulan dengan target produktivitas rata-rata mencapai 10 ton per hektare.

"Alhamdulillah, Padi Sukma sudah keluar SK pelepasan varietas dari Kementerian Pertanian. Saat ini kami sedang menyiapkan benih sumber. Benih sumber ini nantinya akan kita gandakan dan siapkan untuk disebarkan," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Avicenna Medisica Saniputra, dikutip pada Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, legalitas tersebut

menjadi pijakan bagi Pemkab Malang untuk mengembangkan Padi Sukma secara lebih luas. Setelah benih sumber tersedia, proses selanjutnya diarahkan pada perbanyakan benih sebelum nantinya dapat didistribusikan untuk pengembangan budidaya.

Avicenna menjelaskan, proses pengembangan benih sumber tersebut ditargetkan berlangsung hingga akhir musim tanam 2027. Apabila berjalan sesuai rencana, Padi Sukma diproyeksikan mulai diperkenalkan secara lebih luas sekitar Oktober 2027 mendatang.

Target pengembangan tersebut tidak terlepas dari potensi produktivitas Padi Sukma yang telah terlihat dalam pengujian. Varietas yang ditemukan dari hasil budidaya petani di Desa Kasembon itu disebut pernah mencapai produktivitas tertinggi hingga 14 ton per hektare.

"Padi ini munculnya ditemukan di Kabupaten Malang dan produksinya

luar biasa. Tertinggi sudah mencapai 14 ton. Rata-rata Kabupaten Malang selama ini kan cuma 7 ton. Lalu nasional itu 5,2 ton dan Jawa Timur 5,2 ton," jelasnya.

Meski pernah mencapai angka 14 ton per hektare, Pemkab Malang membidik target yang lebih realistis untuk pengembangan, yakni produktivitas rata-rata sekitar 10 ton per hektare. Jika target tersebut dapat dicapai secara konsisten, peningkatan produksi dibandingkan rata-rata produktivitas padi Kabupaten Malang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 30 persen.

"Harapan saya nanti kalau varietas ini bisa 10 ton saja, dengan 7 ton yang sekarang, bisa 30 persen peningkatan produksi kita, itu luar biasa," tutur Avicenna.



Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Avicenna Medisica bersama warga Bululawang penemu benih padi Sukma, Ngateman. (foto: ist)

Ditegaskannya, target tersebut masih menjadi gambaran potensi yang ingin diwujudkan melalui pengembangan Padi Sukma. Konsistensi produktivitas tetap membutuhkan pengujian serta pendampingan budidaya secara berkelanjutan. (Santi/Dya)

Probable 20' shipping container

Uranium enrichment plant, two centrifuge cascade halls

Storage facility

Aktivitas di reaktor nuklir Yongbyon, Korea Utara. Foto: Reuters/CSIS/Beyond

IAEA sebelumnya juga melaporkan perkembangan fasilitas nuklir Korea Utara. Laporan badan nuklir PBB itu menyebut adanya fasilitas pengayaan uranium baru di kompleks nuklir Yongbyon yang diperkirakan dapat menampung hingga 28 rangkaian sentrifus.

IAEA juga mendeteksi perluasan fasilitas pengayaan uranium di Kangson. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya ekspansi infrastruktur nuklir Korea Utara di sejumlah lokasi.

"Dalam penilaian berkala kami, kami dapat mengonfirmasi adanya peningkatan cepat dalam operasi reaktor Yongbyon," ujar Kepala Badan Pengawas Nuklir PBB atau International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi, dilansir AFP.

Temuan itu menjadi salah satu alasan kekhawatiran internasional terhadap kemampuan Pyongyang. Korea Utara sendiri tidak menerima tuntutan tersebut dan justru menyatakan akan mempertahankan kemampuan nuklirnya.

Reuters melaporkan Kim Yo Jong menyebut pembahasan IAEA sebagai "familiar silly talk" dan kembali menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak dapat dibalik.

Besaran persenjataan nuklir Korea Utara juga masih sulit dipastikan karena program nuklir negara tersebut sangat tertutup.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Agustus 2026 mengatakan Korea Utara memiliki 57 senjata nuklir yang disebutnya "sangat kuat". Sementara itu, perkiraan Korea Selatan yang dikutip dalam laporan media berada pada kisaran 80 hingga 120 senjata nuklir.

Perkiraan lembaga independen lebih rendah. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam laporan 2026 memperkirakan Korea Utara telah merakit sekitar 60 hulu ledak nuklir dan memiliki material fisil yang cukup untuk membuat sedikitnya 30 hulu ledak tambahan. SIPRI juga menyebut Pyongyang terus mengembangkan kemampuan nuklirnya untuk memenuhi target memperbesar persenjataan secara eksponensial. (ist,kcna,ist/dya)

KIM YO JONG: HANYA ORANG 'IDIOT' YANG BERHARAP KORUT LUCUTI NUKLIR

Korea Utara (Korut) kembali menegaskan tidak akan meninggalkan program senjata nuklirnya. Kim Yo Jong, adik sekaligus salah satu pejabat berpengaruh di lingkaran pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyebut harapan agar Pyongyang melakukan denuklirisasi sebagai hal yang hanya dipercaya oleh orang "idiot".

Pernyataan itu disampaikan Kim Yo Jong ketika Korea Utara mengecam pembahasan denuklirisasi dalam sidang umum ke-70 Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria.

Kim menegaskan status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir bersifat permanen.

"Posisi DPRK sebagai negara pemilik senjata nuklir adalah mutlak dan tidak dapat diubah oleh apa pun," kata Kim Yo Jong dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), Kamis (17/9/2026).

DPRK merupakan singkatan dari Democratic People's Republic of Korea atau Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korea Utara.

Kim menyebut seruan denuklirisasi yang kembali muncul dalam forum IAEA sebagai "ocehan konyol yang sudah biasa didengar". Ia menilai pertemuan dan pembahasan yang dilakukan IAEA maupun negara-negara Barat tidak akan mengubah kebijakan nuklir Pyongyang.

"Betapapun gigihnya IAEA dan Barat mengadakan pertemuan berkala dan membahas denuklirisasi berdasarkan skenario yang telah ditetapkan, hal itu tidak akan berdampak pada tekad dan kemampuan DPRK untuk mengambil segala langkah yang diperlukan demi mempertahankan kepentingan

tertinggi negara," ujarnya.

Menurut Kim, status nuklir Korea Utara telah mengakar secara fisik dan hukum.

"Kenyataan bahwa posisi nuklir DPRK telah ditetapkan secara permanen, baik secara fisik maupun hukum, tidak dapat berubah sedikit pun," kata dia.

"Tidak ada seorang pun atau apa pun yang dapat membalikkan perubahan krusial dalam kekuatan dan posisi DPRK, ataupun mencegahnya di masa depan," lanjutnya.

Pada Kamis (17/9), Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Kim Kang Il juga menyatakan bahwa peningkatan kerja sama militer Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang menjadi alasan bagi Pyongyang untuk terus memperkuat kemampuan nuklirnya.

Dalam forum Xiangshan di Beijing, Kim Kang Il menyebut peningkatan kemampuan militer negara-negara yang dianggap sebagai lawan Korea Utara membenarkan pembangunan "perisai nuklir" Pyongyang.

Dengan demikian, pembahasan denuklirisasi kembali berhadapan dengan posisi yang berlawanan. IAEA dan sejumlah negara menyerukan penghapusan program senjata nuklir Korea Utara, sementara Pyongyang menyatakan status nuklirnya tidak dapat dinegosiasikan.

Bagi Kim Yo Jong, bahkan tekanan

diplomasi dan forum internasional tidak akan mengubah arah tersebut.

"Tidak ada seorang pun atau apa pun yang dapat membalikkan perubahan krusial dalam kekuatan dan posisi DPRK," ujarnya.

IAEA Soroti Pengayaan Uranium Meluas

Pernyataan Kim Yo Jong muncul ketika komunitas internasional justru menyoroti perkembangan kapasitas nuklir Korea Utara.

Dalam sidang umum ke-70 IAEA, negara-negara anggota menyatakan keprihatinan atas kapasitas nuklir Pyongyang yang terus berkembang. Mereka mendesak Korea Utara meninggalkan program senjata nuklir secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dibalikkan, sesuai dengan kewajiban nonproliferasi nuklir.



Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, Kim Yo-Jong. Foto: KCTV

Kopi Gayo Masuk Daftar Terbaik Dunia, Apa Istimewanya?

Kopi Gayo kembali mendapat sorotan di panggung kopi dunia. Produk Gayo Kopi varian Kopi Luwak atau Wild Civet Coffee memperoleh skor 4,9 dari 5 dalam daftar kopi terbaik dunia versi TasteAtlas 2026.

Dalam daftar yang diperbarui pada 9 September 2026 itu, Gayo Kopi berada di peringkat ke-11 dunia. Skornya menyamai sejumlah kopi premium dari berbagai negara, sementara posisi teratas ditempati Hacienda La Esmeralda Panama Geisha dari Panama dengan skor 5,0.

Capaian tersebut sekaligus menempatkan Gayo Kopi sebagai produk kopi Indonesia dengan penilaian tertinggi dalam daftar TasteAtlas. Namun, ada hal yang perlu diperjelas. Predikat tersebut tidak berarti seluruh kopi Gayo secara otomatis dinobatkan sebagai kopi terbaik dunia.

TasteAtlas secara spesifik mencantumkan Gayo Kopi – Kopi Luwak, yang disebut menggunakan biji kopi dari Dataran Tinggi Gayo dan diperoleh melalui proses yang melibatkan luwak liar. TasteAtlas menempatkannya di posisi pertama dalam daftar kopi Indonesia.

Meski demikian, penghargaan tersebut kembali memperlihatkan bagaimana kopi dari dataran tinggi Aceh memiliki karakter yang kuat di pasar specialty coffee.

Tumbuh di Dataran Tinggi

Kopi Gayo merujuk pada kopi Arabika yang dibudidayakan di kawasan Dataran Tinggi Gayo, Aceh. Wilayah produksinya antara lain Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Kondisi geografis menjadi salah satu alasan mengapa kopi dari kawasan ini mempunyai karakter cita

rasa yang berbeda. Penelitian mengenai Kopi Arabika Gayo dengan indikasi geografis menunjukkan bahwa ketinggian tempat berpengaruh terhadap karakter fisik dan cita rasa biji. Penelitian yang dilakukan di Aceh Tengah dan Bener Meriah pada ketinggian 1.000-1.500 meter serta 1.500-1.750 meter di atas permukaan laut menemukan profil cita rasa dengan skor 82,75-85,25 dan masuk kategori specialty coffee. Pada lokasi yang lebih tinggi, kualitas fisik dan cita rasa secara umum juga lebih baik.

Kondisi pegunungan membuat buah kopi tumbuh dalam lingkungan yang relatif sejuk. Proses pematangan yang lebih lambat dapat membantu pembentukan senyawa yang berkontribusi terhadap karakter rasa dan aroma kopi. Karena itu, ketika berbicara tentang keistimewaan Kopi Gayo, faktor geografis tidak bisa dipisahkan dari cita rasa yang dihasilkan.

Karakter Rasa Khas

Kopi Gayo dikenal memiliki karakter yang berbeda dengan sejumlah kopi Arabika lainnya. Profil yang sering muncul antara lain body yang kuat, keasaman relatif rendah, rasa manis, nuansa nutty, rempah, serta sentuhan cokelat dan herbal, bergantung pada varietas, ketinggian dan metode pengolahannya. Karakter tersebut membuat kopi Gayo cukup fleksibel untuk

dinikmati sebagai single origin maupun digunakan dalam campuran atau house blend. Dalam dunia specialty coffee, rasa bukan hanya ditentukan oleh jenis tanaman. Lingkungan tempat kopi tumbuh, cara buah dipanen, proses setelah panen hingga metode sangrai dan penyeduhan ikut menentukan hasil akhir dalam cangkir.

Itulah sebabnya dua kopi yang sama-sama berasal dari Gayo belum tentu mempunyai profil rasa identik. Ketinggian memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor. Varietas tanaman, kondisi tanah, iklim, proses panen, fermentasi, pengeringan dan metode pengolahan dapat mengubah karakter biji secara signifikan.

Dalam pengolahan kopi Gayo, salah satu metode yang terkenal adalah wet hulling atau giling basah. Metode ini merupakan bagian dari tradisi pengolahan kopi di Sumatera dan berkontribusi terhadap karakter body serta tingkat keasaman yang khas.

Metode pengolahan yang berbeda juga dapat menghasilkan pengalaman rasa berbeda. Kopi Gayo yang diproses secara natural, washed, honey maupun metode eksperimental dapat menampilkan aroma dan rasa yang tidak sama meskipun berasal dari kawasan yang berdekatan.

Produk yang mendapat skor 4,9 di TasteAtlas adalah Gayo Kopi varian Kopi Luwak. Dalam penjelasannya,

TasteAtlas menyebut biji tersebut berasal dari Dataran Tinggi Gayo dan dikumpulkan dari luwak liar yang secara alami memilih dan memakan buah kopi. Produsen yang dicantumkan TasteAtlas juga menekankan konsep luwak liar dan tidak dikandangkan.

Kopi luwak sendiri memiliki proses yang berbeda dibandingkan kopi biasa. Buah kopi dimakan luwak, kemudian bijinya melewati saluran pencernaan sebelum dikeluarkan. Biji selanjutnya dikumpulkan, dibersihkan, dikeringkan dan diproses menjadi kopi.

Proses tersebut diyakini dapat memengaruhi karakter rasa, meskipun kualitas akhirnya tetap sangat bergantung pada bahan baku, kebersihan, pengolahan dan penanganan pascapanen.

Karena itu, istilah “Kopi Gayo” dan “Kopi Luwak Gayo” sebaiknya tidak digunakan secara bergantian. Kopi Arabika Gayo merupakan kategori kopi berdasarkan asal dan karakter geografis, sedangkan produk yang dinilai TasteAtlas dalam daftar tersebut adalah Gayo Kopi – Kopi Luwak. (far,ist/dya)



Bumi Makin 'Sakit', Ilmuwan Catat Rekor Baru Gas Rumah Kaca dan Suhu



Bayangkan Bumi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan. Dokter memeriksa kadar gas dalam darah, suhu tubuh, kondisi organ, hingga tekanan darah.

Hasilnya bukan sekadar menunjukkan satu masalah, melainkan sejumlah indikator yang sama-sama mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai.

Gambaran itu muncul dalam laporan State of the Climate in 2025, laporan tahunan ke-36 yang diterbitkan Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS). Laporan tersebut menghimpun pengamatan dari daratan, lautan, wilayah es, dan satelit, dengan kontribusi 625 ilmuwan dari 60 negara.

American Meteorological Society (AMS) menyebut laporan ini sebagai

semacam pemeriksaan kesehatan tahunan terhadap sistem iklim Bumi. Presiden AMS Alan Sealls mengatakan laporan tersebut membantu menghubungkan kondisi berbagai ekosistem melalui pengukuran dan tren penting yang dapat menjadi acuan lembaga, komunitas, dunia usaha, hingga individu dalam membuat perencanaan jangka panjang.

"State of the Climate menghubungkan kesehatan seluruh ekosistem. Laporan ini menyajikan pengukuran dan tren penting yang menjadi acuan lembaga, komunitas, bisnis, dan individu untuk perencanaan jangka panjang," kata Sealls, dikutip dari Earth.com.

Gas rumah kaca kembali cetak rekor

Salah satu indikator yang diperiksa adalah atmosfer. Pada 2025, tiga gas rumah kaca utama, karbon

dioksida (Co2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O), kembali mencapai konsentrasi tertinggi dalam catatan pengamatan.

Konsentrasi rata-rata global CO2 mencapai 425,6 ppm, sekitar 53 persen lebih tinggi dibandingkan tingkat sebelum era industrialisasi. Data penelitian global terbaru juga mencatat konsentrasi metana mencapai 1.936,3 ppb dan N2O sebesar 339,4 ppb pada 2025.

Emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil pun mencapai rekor, diperkirakan 10,3 petagram karbon per tahun. Jumlah tersebut lebih dari tiga kali lipat dibandingkan sekitar 3 petagram karbon per tahun pada 1960-an.

Sederhananya, semakin banyak gas rumah kaca terkumpul di atmosfer, semakin besar energi panas yang tertahan dalam sistem Bumi.

Panas ekstrem

Yang membuat kondisi 2025 semakin penting adalah tingginya suhu terjadi ketika Bumi tidak berada dalam kondisi El Nino kuat.

Laporan AMS menyebut 2025 termasuk tiga tahun terpanas sepanjang catatan instrumental lebih dari 175 tahun. Bahkan, 11 tahun terpanas dalam sejarah pencatatan semuanya terjadi pada periode 2015-2025. Kondisi tersebut berlangsung ketika sebagian besar 2025 didominasi kondisi ENSO netral yang sejuk dan La Nina lemah.

Data Copernicus juga menempatkan 2025 sebagai tahun terpanas ketiga yang pernah

tercatat, hanya 0,01 derajat Celsius lebih rendah dibandingkan 2023 dan 0,13 derajat lebih rendah dari 2024, yang masih menjadi tahun terpanas.

Artinya, panas ekstrem tidak dapat semata-mata dijelaskan sebagai efek sementara fenomena El Nino. Penumpukan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia tetap menjadi faktor penting dalam tren pemanasan jangka panjang.

Laut menyimpan panas

Jika atmosfer dianalogikan sebagai salah satu organ Bumi, lautan juga menunjukkan tanda tekanan yang semakin kuat.

Laporan State of the Climate menyebut kandungan panas laut global mencapai rekor tertinggi pada 2025. Selama sekitar setengah abad terakhir, lautan telah menyerap hampir 90 persen energi berlebih yang terperangkap dalam sistem Bumi akibat gas rumah kaca dan faktor lainnya.

Suhu permukaan laut global juga berada pada tingkat sangat tinggi. Rata-rata suhu permukaan laut pada wilayah di luar kutub mencapai sekitar 20,73 derajat Celsius, atau 0,38 derajat lebih tinggi dibandingkan rata-rata 1991-2020. Angka tersebut menjadi yang tertinggi ketiga dalam catatan.

Sekitar 87 persen permukaan laut mengalami sedikitnya satu kejadian marine heatwave atau gelombang panas laut sepanjang 2025.

Dampaknya tidak berhenti di laut. Pemanasan laut berhubungan dengan ekosistem pesisir, perikanan, terumbu karang, hingga cuaca ekstrem. Indikator lain yang tidak kalah penting adalah permukaan laut global. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDAARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Trik OOTD Sederhana agar Tampil Mahal Tanpa Harus Boros

Penampilan yang terlihat mahal tidak selalu berarti harus mengenakan pakaian dari merek premium. Justru, sejumlah trik styling sederhana bisa membuat outfit sehari-hari terlihat lebih rapi, elegan, dan terkonsep meski menggunakan pakaian yang sudah lama ada dilemari.

Kuncinya ada pada detail. Pakaian yang bebas kusut, perpaduan proporsi yang tepat, warna yang saling

terhubung, hingga sepatu dan tas yang terawat dapat mengubah tampilan kaus dan jeans biasa menjadi jauh lebih polished. Prinsip tersebut juga sejalan dengan perkembangan gaya minimalis dan quiet luxury yang masih memengaruhi dunia fashion. Gaya ini menempatkan potongan pakaian, kualitas tampilan, dan detail sebagai perhatian utama, bukan logo atau harga barang. Vogue bahkan menekankan bahwa pakaian sederhana dapat terlihat lebih elevated ketika memiliki potongan yang baik, aksesoris yang tepat, dan keseluruhan tampilan yang terjaga.

Pastikan pakaian bebas kusut

Ini mungkin terdengar sepele, tetapi menjadi salah satu faktor terbesar yang menentukan apakah outfit terlihat rapi atau justru lusuh. Sebagus apa pun model pakaian yang dikenakan, kerutan pada kain dapat membuat keseluruhan tampilan terlihat kurang terawat.

Karena itu, menyetrিকা atau menggunakan steamer beberapa menit sebelum keluar rumah bisa memberikan perubahan yang cukup signifikan. Pakaian yang bebas kusut membuat permukaan kain terlihat lebih bersih dan struktur pakaian lebih mudah terbaca. Bahkan kombinasi sederhana seperti kaus polos dan jeans dapat terlihat lebih elegan ketika keduanya dalam kondisi rapi.

Harper's Bazaar juga memasukkan pakaian yang baru disetrিকা sebagai salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan tampilan outfit. Menurut panduan styling mereka, proses pressing atau steaming dapat memberikan kesan lebih polished pada

pakaian sehari-hari. Jadi, sebelum menambah aksesoris atau membeli pakaian baru, coba lihat kembali kondisi pakaian yang sudah dimiliki. Bisa jadi yang dibutuhkan hanya setrika.

Permainan proporsi

Kesalahan yang sering terjadi ketika mengenakan pakaian oversized adalah seluruh bagian tubuh tertutup pakaian berukuran besar. Akibatnya, siluet tubuh menjadi kurang terlihat dan outfit tampak berat. Solusinya adalah menciptakan kontras proporsi.

Jika mengenakan atasan longgar atau oversized, padukan dengan bawahan yang memiliki potongan lebih tegas, seperti straight-leg jeans, celana lurus atau rok dengan struktur yang jelas. Sebaliknya, jika atasan sudah fitted, bawahan berpotongan lebar atau rok A-line dapat menciptakan keseimbangan.

Memasukkan sebagian bagian depan kemeja atau kaus ke dalam celana juga bisa menjadi trik sederhana untuk memberikan definisi pada garis pinggang.

Perhatian terhadap proporsi memang menjadi salah satu elemen penting dalam gaya kontemporer. Tren fashion 2026 bahkan memperlihatkan bagaimana siluet oversized tetap populer, tetapi sering dipadukan dengan elemen yang lebih terstruktur agar penampilan tidak terlihat datar.

Coba trik color sandwich

Tidak ingin terlalu lama memikirkan kombinasi warna? Teknik color sandwich bisa menjadi jalan pintas. Caranya sederhana: pilih satu warna yang muncul di bagian atas dan ulangi warna tersebut pada bagian bawah atau aksesoris, khususnya sepatu. Misalnya, mengenakan atasan hitam dengan sepatu hitam,

sementara celana berada dalam warna netral seperti denim, abu-abu atau krem.

Untuk pengguna hijab, warna hijab dapat menjadi bagian dari permainan tersebut. Begitu pula dengan topi, ikat pinggang atau aksesoris lain.

Pengulangan warna membuat outfit terasa lebih kohesif karena mata menangkap hubungan antara satu bagian dan bagian lainnya. Hasilnya, pakaian yang sebenarnya sederhana terlihat lebih terencana.

Teknik ini juga dapat dikembangkan menjadi tampilan tonal. Vogue dan sejumlah media fashion internasional masih banyak menampilkan kombinasi warna netral, monokrom, dan tonal sebagai bagian dari gaya minimalis. Pendekatan tersebut membuat outfit terlihat lebih tenang dan terarah. (farist/dya)



Mencuat Jejak Kasusdari Hal 1

Isu jejak kasus BON di Mukhtar NU muncul setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (14/9/2026) terkait dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lain dalam layanan pertanahan.

Dalam operasi itu, KPK mengamankan 17 orang. Setelah melakukan pemeriksaan, lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

KPK juga menyita uang tunai dalam rupiah dan valuta asing dengan nilai total sekitar Rp106,3 miliar. Uang tersebut dikemas dalam sejumlah koper dan kardus. Salah satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang disebut KPK sebagai salah satu pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan informasi mengenai dugaan keterkaitan dana perkara dengan kegiatan Mukhtar NU menjadi salah satu materi yang masih didalami penyidik. KPK belum dapat memastikan apakah terdapat aliran dana dari perkara tersebut yang berkaitan dengan kegiatan organisasi keagamaan tersebut.

"Tadi ditanyakan apakah benar ada penyampaian informasi atau keterangan terkait dengan kegiatan Mukhtar salah satu organisasi di Indonesia. Kita belum bisa sampaikan, tetapi artinya ini juga menjadi substansi atau materi penyidikan yang akan nanti didalami oleh tim penyidik," ujar Taufik, Kamis (17/9/2026).

Delapan tersangka dalam perkara tersebut antara lain Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta politikus Partai Golkar Fahd El Fouz. Selain mereka, KPK juga menetapkan Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi sebagai tersangka.

Menanggapi kabar tersebut, internal PBNU bergerak cepat menepis rumor yang berkembang. Anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) PBNU yang juga Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, meminta publik tak menjadikan dugaan awal sebagai sebuah kesimpulan hukum.

"Nama juga dugaan. Dugaan kok dibikin pedoman... Kita enggak boleh dalam berorganisasi atau



Momen Penyidik KPK Keluar Bawa Koper Usai Geledah 3 Ruang Dirjen ATR/BPN Foto: (Dok istimewa)

bermasyarakat berpedoman pada dugaan. Qur'an melarang itu," tutur Anwar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/9/2026).

Anwar mengaku telah mengonfirmasi langsung kabar ini kepada Bendahara Umum PBNU, Gus Gudfan. Berdasarkan keterangan internal, seluruh pendanaan hajatan PBNU murni bersumber dari kas resmi organisasi.

"Saya tanya, 'Ini kok ada berita seperti ini gimana?' Dia menjawab, 'Sepeser pun tidak ada dari luar. Semuanya berasal dari kas Bendahara Umum,'" kata Anwar menirukan respons bendahara.

Senada dengan Anwar, mantan Ketua Panitia Pelaksana (OC) Mukhtar ke-35 NU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa operasional Mukhtar steril dari uang hasil korupsi BPN.

"Sebagai Ketua Panitia, saya pastikan tidak ada kaitan kasus yang sedang ramai dibicarakan ini dengan Mukhtar. Saya pastikan itu tidak ada," tegas Gus Ipul di Jakarta.

Ia meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada lembaga antirasuah tanpa membangun narasi spekulatif. "Jangan sampai kita menambahkan dengan opini yang tidak sesuai fakta, apalagi dikaitkan dengan Mukhtar," pungkasnya.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan kesimpulan resmi mengenai muara aliran uang Rp106,3 miliar tersebut. Kepastian hukum atas dugaan ini masih bergantung pada bukti-bukti yang tengah dikumpulkan penyidik di Gedung Merah Putih.

Geledah Kementerian ATR/BPN

KPK selesai menggeledah tiga ruang Dirjen di Kementerian ATR/BPN terkait kasus suap pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Bogor, Jawa Barat (Jabar). Penyidik

KPK terlihat menenteng sejumlah koper hitam usai menggeledah tiga ruang dirjen itu.

Dalam foto yang diterima, Kamis (17/9/2026), penyidik KPK keluar dari lobi gedung Kantor Kementerian ATR/BPN pukul 18.35 WIB. Saat itu juga, tampak sejumlah penyidik membawa tiga koper berwarna hitam.

Koper-koper itu kemudian dibawa menuju ke dalam mobil Innova Hitam yang telah terparkir dekat lobi. Kemudian mobil itu meninggalkan lokasi setelah semua koper dimasukkan.

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di tiga ruangan Dirjen Kementerian ATR/BPN. Pertama, Ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Kemudian Ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang dan terakhir Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

"Hari ini penyidik mulai melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, di antaranya di tiga ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).

Budi menjelaskan, selain tiga ruang Dirjen, penyidik juga menggeledah ruang sejumlah direktur pada masing-masing direktorat. Penyidik turut menyita barang bukti dokumen dari hasil penggeledahan ini.

"Barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang tentunya berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN tersebut," imbuh dia.

Sementara untuk ruang dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Budi menyampaikan saat ini belum menjadi titik yang dikeledah oleh penyidik. Namun dia mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa ruang

Nusron juga akan dikeledah sesuai kebutuhan penyidikan.

"Untuk saat ini penggeledahan dilakukan di tiga ruangan dirjen dan ruangan-ruangan direktorat yang terkait. Ya, nanti kita tunggu perkembangan dari kebutuhan penyidikan. Karena ini masih pertama untuk kegiatan penggeledahan pasca perkara ini naik ke tahap penyidikan," pungkasnya.

Golkar Minta Nusron Wahid Muncul

Di tengah situasi itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Nusron memberikan klarifikasi kepada publik apabila merasa tidak terlibat dengan perkara yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau memang saudara Nusron itu merasa tidak terlibat, tidak melakukan apa-apa, tidak terkait apapun dengan orang-orang yang disebutkan (KPK) itu, saya kira ya klarifikasi saja, sampaikan ke publik apa adanya bahwa memang (kasus) itu tidak ada hubungannya sama sekali (dengan dia)," tegas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).

Menurut Doli, Nusron juga perlu menghadapi proses hukum apabila dalam perkembangannya terdapat keterangan pihak-pihak yang diperiksa KPK yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut.

Namun, Doli mengungkapkan internal Golkar sendiri belum berhasil berkomunikasi langsung dengan Nusron.

Ia mengatakan kontak dengan Nusron terputus sejak isu kasus HGB mencuat. Ketika itu, Golkar tengah menerima kunjungan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP Partai Golkar.

"Makanya kalau kami bisa berkomunikasi (dengan Nusron), saya kira banyak hal yang bisa kami diskusikan supaya kasus ini tidak berlarut-larut, terus kemudian tidak berkembang ke mana-mana," tandasnya. (wid,rls,kum,voi/dya)

SEMPAT DITUNDA PURBAYA, PAJAK SELLER MARKETPLACE MULAI 1 OKTOBER

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang atau seller di marketplace mulai berjalan 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya ditunda ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan empat marketplace yang ditunjuk pemerintah telah siap menjalankan mekanisme pemungutan pajak tersebut. "Mereka kan udah siap sebenarnya, tapi ada penundaan sampai 1 Oktober. Nanti insyaallah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya mereka udah siap. Kita juga udah siap," kata Bimo di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Empat marketplace tersebut yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Menurut Bimo, persiapan sistem untuk pemungutan PPh melalui platform digital itu sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Bimo mengatakan penundaan sebelumnya terjadi karena Purbaya meminta kesiapan implementasi dimatangkan terlebih dahulu.

"Bottleneck-nya ya karena Pak Menteri Purbaya keputusannya untuk sementara menunda, supaya kesiapannya lebih matang," ujar Bimo.

DJP dan marketplace, kata Bimo, juga telah melakukan pengujian sistem melalui sandboxing serta proses stabilisasi. Karena itu, ia memastikan penerapan pada Oktober dapat langsung berjalan.

"Sudah langsung go live, mereka udah siap kok. Kita sudah melakukan sandboxing, kita juga sudah melakukan semacam stabilisasi," kata dia.

Bimo kembali menyebut empat platform yang telah disiapkan untuk menjalankan mekanisme tersebut.

"Empat itu kan ya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli. Itu prosesnya sudah mulai tahun lalu. Jadi no dramas-lah, nggak ada drama," ujar Bimo.

Bukan Pajak Baru

Pungutan tersebut merupakan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanismenya mengubah cara pemungutan pajak dari pedagang yang berjualan melalui marketplace.

Dengan mekanisme baru itu, marketplace yang ditunjuk menjadi pihak yang memungut PPh dari transaksi seller, kemudian menyetorkannya kepada negara. Kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru terhadap transaksi perdagangan elektronik.

Pemerintah sebelumnya



(Ilustrasi) Karyawan toko FVS Solo melakukan siaran langsung atau live shopping penjualan produk fesyen dengan penawaran diskon lewat platform e-commerce di Solo, Jawa Tengah. (Dok.Ant)

menunjuk empat marketplace untuk menjalankan fungsi tersebut, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Reuters juga mengonfirmasi bahwa keempat platform tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemungutan pajak seller oleh marketplace.

Ketentuan tersebut merupakan implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Penerapan pajak ini sebelumnya dijadwalkan mulai 1 Agustus 2026. Namun, Purbaya kemudian menundanya hingga akhir Oktober sehingga pemungutan sebelumnya diproyeksikan mulai 1 November.

Penundaan itu dilakukan di tengah pertimbangan kondisi daya beli masyarakat. Pada Agustus, Purbaya menyatakan penerapan pajak marketplace tidak akan dimulai pada bulan tersebut dan akan ditunda sampai kondisi daya beli membaik.

"Pajak marketplace mungkin akan kita tunda, engga Agustus ini mulai berjalan. Nanti kita tunda dulu sampai daya belinya membalik," kata Purbaya pada 5 Agustus 2026.

Kini, setelah pergantian Menteri Keuangan, DJP menyatakan implementasi dimajukan dan mulai berjalan pada 1 Oktober. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Reuters melaporkan perubahan jadwal tersebut membuat pemungutan pajak e-commerce dimulai satu bulan lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya diumumkan.

Reuters juga mencatat kebijakan itu sempat ditunda Purbaya hingga 1 November sebelum kemudian dibalik menjadi 1 Oktober.

Penerapan kebijakan ini berlangsung ketika skala perdagangan elektronik Indonesia terus berkembang. Laporan Google, Temasek, dan Bain yang dikutip Reuters memperkirakan nilai bruto transaksi (gross merchandise value/GMV) e-commerce Indonesia mencapai US\$71 miliar pada 2025 dan berpotensi mencapai US\$140 miliar pada 2030.

Potensi Capai Rp5 Triliun

Pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace membuka potensi tambahan penerimaan negara hingga sekitar Rp5 triliun per tahun. Potensi itu dihitung dari besarnya transaksi perdagangan melalui platform digital yang menjadi basis pengenaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya memperkirakan nilai transaksi penjualan di Shopee dan Tokopedia saja mencapai Rp563 triliun pada 2024. Jika digabungkan dengan transaksi di marketplace lain, total transaksi diperkirakan melampaui Rp1.000 triliun pada 2025.

Dengan tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen, DJP memperkirakan potensi penerimaan negara dapat mencapai sekitar Rp5 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan nilai transaksi, bukan target penerimaan yang secara khusus ditetapkan dalam APBN.

Besarnya potensi tersebut sejalan dengan pertumbuhan perdagangan digital Indonesia. Reuters, mengutip laporan Google, Temasek, dan Bain &

DATA NILAI TRANSAKSI E-COMMERCE INDONESIA (2015-2025)

- 2015
Nilai Transaksi: ± Rp45,50 Triliun
- 2016
Nilai Transaksi: ± Rp69,80 Triliun
- 2017
Nilai Transaksi: Rp42,20 Triliun
- 2018
Nilai Transaksi: Rp105,60 Triliun
- 2019
Nilai Transaksi: Rp205,50 Triliun
- 2020
Nilai Transaksi: Rp266,30 Triliun
- 2021
Nilai Transaksi: Rp401,10 Triliun
- 2022
Nilai Transaksi: Rp476,30 Triliun
- 2023
Nilai Transaksi: Rp453,75 Triliun
- 2024
Nilai Transaksi: Rp487,01 Triliun
- 2025
Nilai Transaksi: Rp1.100+ Triliun

Company, mencatat nilai bruto transaksi (gross merchandise value/GMV) e-commerce Indonesia mencapai sekitar US\$71 miliar pada 2025. Nilainya diproyeksikan meningkat menjadi US\$140 miliar pada 2030.

Namun, seluruh nilai transaksi e-commerce tidak otomatis menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22.

Regulasi memberikan sejumlah pengecualian, termasuk bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun yang memenuhi persyaratan dan telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

Selain itu, terdapat sejumlah transaksi yang dikecualikan dari pemungutan, antara lain jasa pengiriman tertentu, pulsa dan kartu perdana, emas dalam kategori tertentu, serta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. (tin,ist,kum/dya)